

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT**  
(Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita Karya Bersama di Desa  
Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan)

**Naskah Publikasi**



**Oleh**

**RIZAL KUSNANDI  
NIM : 100563201151**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2015**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
(Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita Karya Bersama di Desa Pengudang  
Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan)

RIZAL KUSNANDI

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP, UMRAH, [Rizalkusnandi@yahoo.com](mailto:Rizalkusnandi@yahoo.com)

Abstrak

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan Kewenangan Desa meliputi di bidang penyelenggaraan, Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan. Desa Pengudang mempunyai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan yaitu KUBE Wanita Karya Bersama (WKB). KUBE WKB merupakan KUBE yang unik di Desa Pengudang serta bekerja sama dengan pihak Yayasan *Island Foundation*. Dimana pihak Yayasan *Island Foundation* ini menampung hasil kerajinan tangan yang telah di buat oleh KUBE WKB yang nantinya akan di pasarkan ke singapura atau ke tamu Yayasan *Island Foundation*, serta hasilnya akan diberikan kepada pihak anggota KUBE WKB. Karena Yayasan *Island Foundation* ini bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, kesehatan dan pendidikan masyarakat Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Bintan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana yang dijadikan populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Kepala Desa Pengudang, Ketua KUBE WKB, dan Ketua Yayasan *Island Foundation*. Dari fenomena yang ditemukan, maka peneliti menggunakan pendapat Covei (Rivai, 2013:156) yang menyebutkan bahwa dimensi dari peran meliputi: (a) Perencanaan alur (*Pathfinding*), hal ini dilihat dari: membuat visi, membuat misi, memberikan saran, bersikap kekeluargaan. (b) Penyelaras (*Aligning*), hal ini dilihat dari: mengelola aturan yang ada, mengawasi aturan yang ada, mengadakan musyawarah, adanya pergeseran nilai budaya. (c) Pemberdayaan (*Empowering*), hal ini dilihat dari: memotivasi anggota kelompok untuk berkarya, memfasilitasi anggota kelompok untuk berkreaitifitas, memberikan pelatihan, mendahulukan kepentingan umum.

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, pada dimensi Penyelaras (*Aligning*), indikator adanya pergeseran nilai budaya, timbulnya kecemburuan sosial terhadap KUBE-KUBE yang ada di Desa Pengudang dan timbulnya persaingan antara anggota KUBE WKB dalam mendapatkan penghasilan secara individual.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
(Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita Karya Bersama di Desa Pengudang  
Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan)

RIZAL KUSNANDI

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP, UMRAH, [Rizalkusnandi@yahoo.com](mailto:Rizalkusnandi@yahoo.com)

*Abstract*

*The implementation of the village administration is subsystem of a system of the government, so that desa having authority to regulate and take care of the interests of community. The village head liable to village representative board and conveying report on the implementation of the to the bupati .Based on regulation article 18 act no 6 2014 giving authority village covering in the field of the, the village administration, the implementation of the village development, community development village, and community empowerment village based on community initiative, the right the origin of and customs village.*

*In order to support community development at village pengudang kecamatan telok sebong kabupaten bintan.Village pengudang have joint business group which are engaged in handicrafts namely kube woman work together .Kube wkb is kube unique in the village pengudang and cooperate with the foundation island foundation.Which the foundation island foundation this accommodate handicrafts the hand that have made by kube wkb which will be in pasarkan to singapore or to guests foundation island foundation, and the results will be given to the members kube wkb.Because foundation island foundation this move in the area of community development with the aim of enhancing living standard, health and education islands society riau especially kabupaten bintan.*

*This research is descriptive qualitative, where used as the population and samples to this research is the village head pengudang, head of kube wkb and head of yayasan island foundation. Of a phenomenon found, so researchers used opinion covei ( rivai , 2013: 156 ) which states that dimensions from the role of covering: (a) Pathfinding, it is seen of: making vision , make mission, give advice, be family. (b) Aligning, it is seen of: managing the existing rules, over the existing rules, hold deliberation, a result of the shift of the cultural. (c) eempowering, it is seen of: motivate members of the group to work, facilitate a member of the group to berkreatifitas, training, give the public interest.*

*Based on the third dimension, the dimension of Aligning, indicator there is a cultural shift, The emergence of social jealousy against kube-kube pengudang at village and emergence competition between members of kube wkb in earn a living individually.*

*Keyword: Role, Empowering*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.

Adapun menurut Widjaja (2007:76) mengatakan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangan otonomi daerah, Pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi Pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi Daerah sebagian tergantung pada Pemerintah daerah itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974, maka yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disamping itu, dengan sendirinya masih terdapat aparatur atau alat-alat perlengkapan Daerah lainnya yaitu para Pegawai Daerah itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat Daerahnya, di samping merupakan obyek dari pembangunan itu sendiri.

Maka dari itu, pembangunan pedesaan merupakan satu diantara bagian integral dari pembangunan Nasional, yang di dalamnya terdapat usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya

alam yang dilakukan secara berkelanjutan dan terencana berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilaksanakan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa sebagai badan eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatifnya. Dengan demikian dalam melaksanakan suatu pembangunan tersebut yang nantinya akan menjadi satu diantara kunci keberhasilan dari pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan satu diantara faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa adalah peranan dari pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa, karena merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peranan kepala desa sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini, berhasil tidaknya seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan Kepala Daerah; berhasilnya tidaknya ia menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan Kewenangan Desa meliputi di bidang penyelenggaraan, Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Maka dari itu pengembangan partisipasi masyarakat perlu di arahkan untuk menggali dan mengidentifikasi potensi ekonomi menuju peningkatan produktifitas dan pelestarian lingkungan. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat pemerintahan di daerah tersebut tidak bisa berkembang.

Undang-undang 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan. Desa Pengudang mempunyai dua puluh dua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dibawah naungan Kepala Desa, tetapi hanya ada empat KUBE yang masih aktif sampai saat ini yaitu KUBE Tani Terpadu, KUBE Merpati Putih, KUBE Nelayan, dan KUBE Wanita Karya Bersama (WKB).

Diantara ke-empat KUBE yang aktif, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tani Terpadu, KUBE Merpati Putih, KUBE Nelayan, dan KUBE Wanita Karya Bersama (WKB). KUBE Wanita Karya Bersama (WKB) mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki KUBE lainnya, karena KUBE WKB telah berhasil menciptakan kerajinan tangan yang disulam dari koran berupa: Guci, Bunga, Topi, Prasmanan Pernikahan, Kotak Tissue, dan Huruf Abjad.

KUBE WKB terbentuk pada tahun 2010 yang beranggota sebanyak 13 orang. Mereka menciptakan hasil karya seni yang bisa di jual kepada turis atau tamu dari lokal maupun non lokal untuk menambah kebutuhan ekonomi mereka dan Kelompok WKB Desa Pengudang. Dalam menciptakan hasil karya seni, mereka tentunya membutuhkan pendanaan untuk membeli bahan-bahan yang akan dibuat menjadi karya seni seperti : Guci, Bunga, Topi, Prasmanan Pernikahan, Kotak Tissue, dan Huruf Abjad. Bahan-bahan yang mereka butuhkan seperti: koran, lem, kertas dan sebagainya untuk membuat kerajinan tangan mereka sampaikan kepada Kepala Desa. Apabila Kepala Desa memberikan bantuan berupa bahan untuk membuat kerajinan tangan, apabila bahan yang diperlukan kurang, maka Kelompok WKB tidak sungkan untuk mengeluarkan dananya masing-masing dari anggotanya agar kelompok WKB tetap bisa berjalan.

Kelompok KUBE WKB mendapatkan penghargaan dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan sebagai atas Partisipasi dalam Pemilihan Kelompok Tribina dan UPPKS Terbaik Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2013 dan penghargaan dari Bupati Bintan sebagai Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terbaik V Tingkat Kabupaten Bintan 2013. (*Sumber: Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita Karya Bersama (WKB) Desa Pengudang*).

Dalam rangka mengembangkan produk yang telah dibuat oleh KUBE WKB untuk dipasarkan dan dapat menghasilkan bagi KUBE WKB sendiri, Kepala Desa membantu memasarkan produk KUBE WKB terhadap pihak Yayasan *Island Foundation*, agar KUBE WKB dapat meningkatkan taraf hidup atau ekonomi mereka.

Yayasan *Island Foundation* ini merupakan Yayasan yang didirikan pada tahun 2010 di Singapura dan pada tahun 2011 dikembangkan ke Indonesia khususnya di Bintan. Yayasan ini bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, kesehatan dan pendidikan masyarakat Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Bintan.

Yayasan *Island Foundation* menampung hasil karya kerajinan tangan yang di buat oleh KUBE-KUBE yang ada di Bintan yang khususnya bergerak dalam bidang kerajinan tangan yang akan di pasarkan ke singapura salah satunya KUBE WKB yang ada di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan. Karena KUBE WKB salah satu KUBE yang sangat unik dan menjadi KUBE unggulan di Desa Pengudang, serta hasil karyanya sudah banyak diterima atau diminati oleh tamu dari Yayasan *Island Foundation*. Maka dari itu, pihak Yayasan *Island Foundation* hanya membantu memasarkan produk-produk yang telah di buat KUBE WKB terhadap tamu Yayasan *Island Foundation*, serta hasil yang telah di dapatkan akan diberikan kepada pihak anggota KUBE WKB, agar anggota KUBE WKB dapat menikmati hasil dari karya yang telah mereka buat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan pengkajian terhadap topik ini secara mendalam dalam suatu penelitian ilmiah, yang kemudian diberi judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita Karya Bersama di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan)”**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu **“Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita Karya Bersama di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan)”**?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan asumsi dasar dari sebuah penelitian, dan menjadi faktor pendorong bagi para peneliti untuk melakukan penelitian. Selain itu tujuan merupakan sebuah patokan atau arahan bagi sebuah penelitian, sehingga penelitian memiliki arah yang jelas dan lebih fokus kemana arah yang hendak dituju dalam penelitian tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan.
  - b Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan.
2. Kegunaan Penelitian
- a Secara akademis, sebagai bahan informasi bagi Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong.
  - b Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi kepala desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam pemberdayaan masyarakat di daerahnya. Dan dapat memberikan kontribusi bagi instansi untuk melakukan evaluasi, dan untuk pembaca dapat digunakan sebagai referensi.

## II. KONSEP TEORI

### 1. Peran Pemerintah Desa (Pemdes)

Menurut Soekanto (2012:213) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam sebuah organisasi, menurut Rivai (2004:147-148) ada terdapat dua peranan yang berbeda yaitu :

1. Peran kepemimpinan yaitu mengerjakan hal yang benar. Ini ada hubungannya dengan visi dan arah.
2. Peranan manajemen yaitu mengerjakan hal secara benar atau pelaksanaan.

Menurut Rivai, peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan dihadapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Covey (Rivai, 2013:156), membagi peran menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pencarian alur (*Pathfinding*) yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
2. Penyelaras (*Aligning*) yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem, dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
3. Pemberdayaan (*Empowering*) yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apa pun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Peranan yang dimaksud oleh Levinson (Wulansari, 2009:109) adalah sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Secara umum di Indonesia, desa dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggung jawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Wilayah yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada dibawah Camat. Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrumen koordinator dan penguasa supra desa (Negara melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah).

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005:18).

Sedangkan menurut Sunardjo dalam Buku Wasistiono (2007:10) menjelaskan bahwa:

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak

menyelenggarakan rumah  
tangannya sendiri.”

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang dari kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya disektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Namun pengertian desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Bouman (dalam Beratha, 1982;26) yang mendefinisikan desa:

“Sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.”

Desa-desa tersebut atau dengan nama aslinya yang setingkat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan karakteristik:

- a Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku.
  - b Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
  - c Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepada desa dapat diberikan sumbangan atau bantuan.
2. Pemberdayaan Masyarakat

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna

dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi pembangunan daerah yang kondusif, sehingga akan muncul kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.

Memberdayakan orang lain pada hakikatnya merupakan perubahan budaya, sehingga pemberdayaan tidak akan jalan jika tidak dilakukan perubahan seluruh budaya organisasi secara mendasar. Sumaryadi, (2005: 105) Perubahan budaya sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih efektif.

Menurut Widjaja ( 2007:77) pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan bawah. Inti dari pemerdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapai tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005:136) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandirian di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatifn di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Pemberdayaan dalam versi Paulo Freire (Soetomo, 2009:418-419) tidak hanya berarti memberi kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan sumber alam dan dana pembangunan



saja, tetapi juga mendorong masyarakat untuk perubahan struktural, yang hanya mungkin dilakukan melalui partisipasi politik. Untuk memahami proses pemberdayaan secara lebih proporsional, Korten (Soetomo, 2009:419) merumuskan pengertian power sebagai kemampuan untuk mengubah kondisi masa depan melalui tindakan dan pengambilan keputusan.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (Soetomo, 2009:422) pemberdayaan terdapat tiga pandangan berbeda, sebagai berikut:

“Pandangan pertama pemberdayaan berarti penghapusan kekuasaan, karena kekuasaan yang dianggap penyebab ekistensi manusia teralienasi. Pandangan kedua, pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan kepada seua orang untuk menghindari kekuasaan yang terpusat. Sedangkan pandangan yang ketiga, pemberdayaan berarti memperkuat yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat.

Selanjutnya pemakaian pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan Ali (2007:86) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreatifitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”.

Pemberdayaan adalah pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial,

kekuatan politik, dan hak-haknya menurut UU. Dimana pemberdayaan dapat dilakukan dengan indikator yang disebutkan oleh Mark G. Hanna dan Buddy Robinson (Hikmat, 2010:19):

- a. Strategi tradisional, yaitu menyarankan agar mengetahui dan memiliki kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.
- b. Strategi direct-action, yaitu menumbuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi.
- c. Strategi transformatif, yaitu menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengindetifikasian kepentingan diri sendiri.

Menurut Ginandjar (Jafar, 2008:138) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

### III. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berpedoman pada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Pengudang termasuk faktor penghambat dan pendorong dalam memberdayakan masyarakat.

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moeleong,

2000:3) sedangkan menurut Namawi dan Martini (1992:211) mengemukakan bahwa ciri dari salah satu penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, dimana data yang ditampilkan umumnya berbentuk uraian dan kalimat-kalimat yang merupakan gambaran faktual dan akurat, serta hubungan antar masalah yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Pengudang Kec. Telok Sebong Kab. Bintan.
- b. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pengudang Kec. Telok Sebong Kab. Bintan.

## 3. Populasi dan Sample

Sugiyono (2010:90) populasi adalah wilayah penelitian yang terdiri atas obyek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa pengudang kecamatan teluk sebong kabupaten bintan. Sesuai ruang lingkup peneliti, maka populasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Ketua Kube WKB, Ketua *Yayasan Island Foundation* yang berada di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan berjumlah 3 orang.

Mengingat jumlah populasi yang relatif sedikit, maka penulis mengambil sample "*Sampling Purposive* dan *Snowball sampling*", sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011:68) *sampling purposive* teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sumber datanya orang yang ahli dalam makanan. Sugiyono (2011:68) *Snowball sampling* adalah teknik penentuan

sample yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sample, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sample semakin banyak.

Sedangkan untuk Kepala Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan merupakan Informan Kunci ( *Key Informan* ) yang sangat menunjang dalam penelitian ini.

## 4. Jenis data dan Sumber Data

Agar data yang diperoleh untuk penelitian ini lengkap, maka peneliti perlu menetapkan sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer  
Data primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari informan, yaitu Kepala Desa dan Ketua KUBE WKB.
- b. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya berupa bukti, catatan-catatan yang telah tersusun dalam arsip.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara  
Teknik wawancara merupakan kegiatan tanya jawab atau interview yang dilakukan secara bebas namun terarah dengan kata lain pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya dan jika diperlukan pertanyaan tersebut dapat berkembang melihat situasi dan kondisi di lapangan. Melalui teknik ini apabila informasi dianggap sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan informasi akan di akhiri.
- b. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan peneliti ini, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.

#### 6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang peneliti gunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kumpulan berwujud kata-kata, kalimat, uraian-uraian, serta dapat berupa analisis ringkas, bahkan pada beberapa data tertentu dapat menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, walaupun tidak jelas batasnya dengan berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, informasi, dan data.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2003:246), mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh”. Aktifitas dalam analisa data, yaitu:

##### 1) Reduksi Data

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan akhir.

##### 2) Sajian Data

Merupakan suatu rakitan informasi, deskriptif dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan sajian dan harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.

##### 3) Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan,

sebab akibat dan berbagai proporsi, kesimpulan perlu diverifikasi agar penelitian yang dilakukan benar dan bisa dipertahankan.

#### IV. PEMBAHASAN

##### 1. Perencanaan alur (*Pathfinding*)

Perencanaan alur (*Pathfinding*), merupakan peran yang harus dijalankan oleh pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dalam studi KUBE Wanita Karya Bersama Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan dapat dilihat dari masing-masing pengukuran yaitu:

###### a. Membuat visi

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap peran pemerintah dalam membuat visi sebagai berikut:

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua KUBE WKB dan Ketua Yayasan *Island Foundation* menjawab sebagai berikut:

Informan 1: “...visi dari pemdes sih ee untuk mensejahterakan anggota kube wkb dalam pengembangan kerajinan tangan untuk para ibu-ibu disekitar pengudang, terus ee ada keterkaitanlah dengan visi desa” (Wawancara, tanggal 26 Mei 2015).

Informan 2: “...untuk visi dari pemerintah sendiri, biasanya pemerintah desa lebih menekankan untuk memberdayakan masyarakat terutama dalam meningkatkan taraf hidup” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari Pendamping KUBE WKB dan Kaur Keuangan Desa Pengudang menjawab sebagai berikut:

Informan 3: “...dari pemerintah desa visinya memberdayakan masyarakat” (Wawancara, tanggal 1 Juni 2015).

Informan 4: "...menjadikan KUBE-KUBE yang berkualitas" (Wawancara, tanggal 28 Mei 2015).

Kemudian informan yang berasal dari Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut:

Informan 5: "... untuk mengembangkan hasil kerajinan, terutama kerajinan tangan yang kreatif ee yang memberi penghasilan kepada kube wkb itu sendiri serta untuk menyelaraskan dengan visi desa pengudang itu sendiri" (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Informan 6: "...menciptakan kerajinan tangan yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat digunakan oleh anggota KUBE WKB itu sendiri" (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, *Key Informan* yaitu Kepala Desa Mengatakan:

"...Hmhm tunggu dulu ya? Paling tidak visi dari KUBE WKB pengudang itu, itu untuk disarankan diselaraskan dengan visi di desa, karena visi di desa itu banyak keterkaitannya dengan pengembangan pariwisata. Jadi dalam pembuatan visi di KUBE WKB, saya selaku pemdes pengudang, memberikan masukan agar visi KUBE WKB diseleraskan dengan visi desa." (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa dalam membuat visi untuk pemberdayaan KUBE WKB yaitu visi desa yang dibuat berhubungan dengan mensejahterakan anggota KUBE WKB serta, mendorong para masyarakat desa Pengudang terutama para ibu-ibu untuk kreatif dalam mengembangkan kerajinan

tangan dan menyelaraskan visi KUBE WKB dengan visi Desa Pengudang.

b. Membuat misi

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap peran pemerintah dalam membuat misi sebagai berikut:

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua KUBE WKB dan Ketua Yayasan *Island Foundation* menjawab sebagai berikut:

Informan 1: "...ee kalau misi, Pemerintah desa menyarankan agar misi wkb tidak jauh berbeda lah dengan misi desa. Bisa dibbilang ee ada keterkaitan sama desa" (Wawancara, tanggal 26 Mei 2015).

Informan 2: "...untuk pemerintah desa pengudang sendiri lebih menekankan, bagaimana kube wkb bisa produktif, sehingga bisa menghasilkan apa yang mereka kerjakan" (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari Pendamping KUBE WKB dan Kaur Keuangan Desa Pengudang menjawab sebagai berikut:

Informan 3: "...untuk membuat masyarakat sehat, sehat dalam artian sehat berpikir, ee memberikan arahan atau pengetahuan" (Wawancara, tanggal 1 Juni 2015).

Informan 4: "...meminimalisir kube-kube yang baru, jadi kita liat dulu kube-kube ini ada dan aktifitasnya juga jelas" (Wawancara, tanggal 28 Mei 2015).

Kemudian informan yang berasal dari Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut

Informan 5: "...itu untuk mensejahterakan anggota kube wkb dalam berkeaktifitas terutama di bidang kerajinan tangan"

(Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Informan 6: "...kalau misi itu ya paling tidak menyarankan misi kube selaraslah dengan misi desa, mungkin dengan kreatifitas dalam bidang kegiatan kerajinan tangan bagi kube itu sendirilah dalam pengembangan kerajinan tangan" (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, *Key Informan* Menyatakan: "...Misi itu kegiatan suatu penunjang dari pada kegiatan yang ada di visi itu, dalam membuat misi di KUBE itu, itu paling tidak diselaraskan dengan misi desa. Visi dan Misi ini terkait, karena misi itu pengembangan dari visi. Maka ee kalau dalam membuat misi di KUBE itu memang saya menyarankan agar diselaraskan dengan desa" (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa dalam membuat misi untuk pemberdayaan KUBE WKB yaitu Pemerintah Desa memberikan arahan atau pengetahuan kepada anggota KUBE WKB dalam pengembangan kerajinan tangan dan diseleraskan dengan misi Desa Pengudang.

c. Memberikan saran

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap peran pemerintah desa dalam memberikan saran sebagai berikut:

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua KUBE WKB dan Ketua Yayasan *Island Foundation* menjawab sebagai berikut:

Informan 1: "...memberikan semangat kepada kami anggota wkb dalam menciptakan karya kerajinan tangan yang berkualitas" (Wawancara, tanggal 26 Mei 2015).

Informan 2: "...hhmm saran yang diberikan pemerintah desa itu berupa motivasi, terus cara kerja agar kube wkb semangat dalam mengerjakan kerajinan tangan yang mereka buat" (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari Pendamping KUBE WKB dan Kaur Keuangan Desa Pengudang menjawab sebagai berikut:

Informan 3: "...sarannya ya itu lah adanya pembentukan WKB yang dikelola dari pihak yayasan dan dapat bantuan dari pemerintah. Sarannya ya digunakan sesuai prosedur" (Wawancara, tanggal 1 Juni 2015).

Informan 4: "...setakat ini yang jelas desa pasti selalu menekan kan mufakat-mufakat keserasian di dalam keelompok, kemudian yang pasti keaktifan dan kualitas produk yang dihasilkan" (Wawancara, tanggal 28 Mei 2015).

Kemudian informan yang berasal dari Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut

Informan 5: "...saran yang selalu diberikan. Selalu kompak dalam bekerja dan selalu memberikan langkah-langkah pasaran terhadap produk yang berkualitas"(Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Informan 6: "...hmhm, saran ee mungkin dengan berkarya dengan mandiri, manfaatkan waktu dengan baik, bekerja dengan tekun, sehingga karya itu sendiri maksimal. Yang jelas paling penting berguna lah untuk anggota itu sendiri dan masyarakat sekitar" (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, *Key Informan* Menyatakan:

“..kalau saya menyarankan itu, agar di dalam kelompok WKB itu, mereka bisa memanfaatkan waktu dengan baik ee kemudian bekerja dengan tekun, jangan sekali kerja sekali tidak gitu. Jadi harus menekuni pekerjaan itu sehingga hasil yang dikerjakan itu dapat ee membuat atau menciptakan suatu karya kerajinan yang dapat dipasarkan melalui, disinikan ada suatu Yayasan *Island Foundation*, mungkin bisa sebagai wadah untuk menyalurkan kerajinan tangan itu” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan informan dan *key* informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa dalam memberikan saran untuk pemberdayaan masyarakat KUBE WKB yaitu dengan memberikan semangat kepada anggota KUBE WKB dan memberikan masukan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya dapat menghasilkan produk KUBE yang berkualitas dipasaran.

#### d. Bersikap kekeluargaan

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap peran yang dilakukan pemerintah desa dalam bersikap kekeluargaan sebagai berikut:

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua KUBE WKB dan Ketua Yayasan *Island Foundation* menjawab sebagai berikut:

Informan 1: “...selama ini pemerintah desa menganggap kami ini anggota wkb sebagai keluarganya. Hmhm karena pemerintah desa ingin kami anggota wkb agar bisa membawa nama desa lebih baik dengan prestasi yang telah kami raih. Terus ee pemerintah desa memberikan masukkan dalam pengembangan produk kami” (Wawancara, tanggal 26 Mei 2015).

Informan 2: “...Pemerintah desa biasanya bersikap dengan cara mengajak tukar pikiran ataupun biasanya juga berinteraksi langsung antara pemerintah desa dan anggota kube wkb itu sendiri” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari Pendamping KUBE WKB dan Kaur Keuangan Desa Pengudang menjawab sebagai berikut:

Informan 3: “...komunikasi bagus dalam kelompok WKB itu. Maksudnya komunikasi interes terjalin antara pihak desa dan WKB” (Wawancara, tanggal 1 Juni 2015).

Informan 4: “...lebih mengarah ke sistem kekeluargaan apapun itu bentuknya selalu mengarah kekeluargaan, karena pendekatan kekeluargaan lebih efektif, ketimbang pendekatan-pendekatan yang lainnya. Karena dengan pendekatan kekeluargaan ini masalah yang kecil itu pasti akan diperkecil. Jadi selama ini yang dilakukan memberikan ee kenyamanan, keamanan gitu kan, kemudian selalu memfasilitasi apa yang mereka inginkan” (Wawancara, tanggal 28 Mei 2015).

Kemudian informan yang berasal dari Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut:

Informan 5: “...pemerintah desa itu sering menjalin hubungan kekeluargaan dengan cara memberikan motivasi untuk anggota kube wkb itu sendiri dan saling berinteraksi demi menjaga agar kube wkb selalu kompak. Karena dengan ee pendekatan, terutama pendekatan kekeluargaan ini masalah kecil akan menjadi lebih kecil lagi” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Informan 6: “...menjalin hubungan ee antara kube wkb, harus berhubungan baik dengan pihak

pemerintah maupun masyarakat, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Jaddi, emang di pengundang emang ee konsepnya kita kekeluargaan paling penting jadi dalam cara berpikir, massukan dan sebagainya” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, *Key Informan* Menyatakan: “...Dalam WKB itu, rata-rata masyarakat pengundang. Ibuk-ibuknya masyarakat pengundang, makanya ee keanggotaan di KUBE itu, itu harus menganggap bukan rekan kerja, namun ini suatu keluarga yang dibentuk oleh WKB, agar disitu agar memberikan motivasi atau masukkan untuk membangun KUBE tersebut dalam pengembangan kerajinan tangan di pengundang menjadi lebih baik” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa melalui sikap kekeluargaan terhadap KUBE WKB yaitu, pemerintah desa menjalin hubungan dengan memberikan motivasi kepada KUBE WKB dan saling berinteraksi untuk membangun KUBE WKB dalam pengembangan kerajinan tangan di Desa Pengundang dengan sistem pendekatan kekeluargaan. Karena sistem pendekatan kekeluargaan ini lebih efektif dari pada sistem pendekatan yang lainnya.

## 2. Penyelaras (*Aligning*)

Penyelaras (*Aligning*), merupakan peran yang harus dijalankan oleh pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dalam studi KUBE Wanita Karya Bersama Desa Pengundang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan dapat dilihat dari masing-masing pengukuran yaitu:

### a. Mengelola aturan yang ada

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap peran pemerintah ddalam mengelola aturan yang ada sebagai berikut:

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua KUBE WKB dan Ketua Yayasan *Island Foundation* menjawab sebagai berikut:

Informan 1: “... memberikan masukkan aturan yang baik yang telah disepakati bersama” (Wawancara, tanggal 26 Mei 2015).

Informan 2: “...pemerintah desa hanya memberikan masukkan-masukkan, bagaimana aturan yang baik, serta pelaksanaan lapangan untuk kube wkb sendiri” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari Pendamping KUBE WKB dan Kaur Keuangan Desa Pengundang menjawab sebagai berikut:

Informan 3: “...kalau itu secara detailnya abang tidak tau, tapi yang pasti untuk mengelola itu, pihak pemerintah serahkan ke WKB dan WKB mengelola adanya manajemen dan laporan perbulan” (Wawancara, tanggal 1 Juni 2015).

Informan 4: “...Kalau pemerintah tidak terlalu mencampuri, karena itu kan KDRT mereka. Kita disini hanya setakat mengawasi dalam artian ini jangan sampai, mungkin kalau mereka punya masalah kalau tak kita awasi nantikan yang tadinya masalah kecil menjadi besar. Jadi kita cuma mengawasi sekaligus monitoringlah dan mengevaluasi. kita monitor mereka bagaimana evaluasi mereka. nanti dari evaluasi kita kemudian sampaikan ke mereka. Misalnya produk yang kalian hasilkan misalnya kurang dari sisi ini, tolong dong ini di

apakan? kalau butuh mitra kan sudah ada bekerja sama dengan yayasan *Island Foundation*" (Wawancara, tanggal 28 Mei 2015).

Kemudian informan yang berasal dari Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut:

Informan 5: "...dengan memantau anggota kube wkb dalam bekerja dan memberikan saran dan pandangan kepada anggota KUBE WKB itu sendiri dalam menciptakan produknya" (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Informan 6: "...aturan yang baik, ya memberikan ee suatu pemikiran agar kube dapat mengembangkan kreatifitas dengan baik, dengan tenang" (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, *Key Informan* Menyatakan: "...Ee itu, saya hanya memberikan masukan ya aturan dalam pengembangan KUBE tersebut itu adalah aturan yang telah disepakati bersama" (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan informan dan key infroman diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa dalam mengelola aturan yang ada untuk pemberdayaan KUBE WKB yaitu pemerintah desa hanya memberikan masukan aturan yang baik yang telah disepakati bersama oleh KUBE WKB dan pihak desa dalam pengembangan pelaksanaan WKB.

b. Mengawasi aturan yang ada

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap peran pemerintah dalam hal mengawasi aturan yang ada sebagai berikut :

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua KUBE WKB dan Ketua Yayasan

*Island Foundation* menjawab sebagai berikut:

Informan 1: "...mengawasi kami, biasanya melalui pendamping wkb yang hmmm memberikan laporan kepada pemerintah desa dari segi pengembangan atau apa lah. Yang jelas bersangkutan dengan wkb ini lah dek" (Wawancara, tanggal 26 Mei 2015).

Informan 2: "...kalau dalam mengawasi wkb sendiri melalui pendamping yang biasanya ditunjuk dari desa yang akan menyampaikan laporan dari kegiatan wkb terhadap pihak desa" (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari Pendamping KUBE WKB dan Kaur Keuangan Desa Pengudang menjawab sebagai berikut:

Informan 3: "...nah kalau itu disini abang masuk WKB pendamping sebelumnya bg U, kalau yang abang tau ya dia datang mengontrol apa-panya gitu, menyampaikan laporan KUBE ke pemdes" (Wawancara, tanggal 1 Juni 2015).

Informan 4: "...kita ini secara langsung, cuma memang setiap KUBE-KUBE atau kelompok yang ada di desa, memang kita wajibkan buat laporan kedesa" (Wawancara, tanggal 28 Mei 2015).

Kemudian informan yang berasal dari Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut:

Informan 5: "...ee seperti adanya pendamping, pendamping untuk KUBE WKB itu yang ditunjuk oleh kepala desa sendiri, memudahkan untuk kepala desa mengawasi KUBE WKB dengan melihat laporan-laporan atau catatan-catatan yang diserahkan pendamping kube wkb kepada kepala



desa”(Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Informan 6: “...mengawasi mungkin lewat laporan ya, lewat laporan kube itu kan ada pendamping, bisa melalui pendamping, kita minta kepada pendamping untuk KUBE itu memberikan laporan perkembangan kube itu sendiri baik secara apa ya? Keuangan, kelompok yang jelas yang menyangkut kepada KUBE WKB itu sendiri lah, dalam hal apapun baik atau tidak tetap memberikan laporan sehingga kita bisa memantau” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, *Key Informan* Menyatakan: “...Dari pihak kami ya, cara memantau dan mengawasinya adalah kami kan ada ee yang sudah ditunjuk sebagai peendamping. Pendamping itulah yang akan mengawasi perkembangan KUBE. Selain itu kan KUBE harus membuat suatu laporan ke desa, kalau tidak semester, kalau semester itu kan 6 bulan kalau tidak 3 bulan. Karena 1 bulan sekali agak susah. Karena dalam kelompok itu, peengurus-peengurus kelompok KUBE SDMnya sangat rendah jadi kami mengutamakan itu paling tidak 3 bulan/semester, jadi cara mereka untuk membuat suatu laporan ataupun itu apa? Itu ada pendamping, nanti pendamping yang bisa membantu mereka dalam pembuatan laporan-laporan itu” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa dalam mengawasi aturan yang ada untuk pemberdayaan KUBE WKB yaitu melalui pendamping yang ditunjuk secara langsung oleh desa, untuk menyampaikan laporan kegiatan yang ada di KUBE WKB dalam

persemester atau 6 bulan sekali kepada pihak desa.

c. Mengadakan musyawarah

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap peran pemerintah desa dalam mengadakan musyawarah sebagai berikut :

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua KUBE WKB dan Ketua Yayasan *Island Foundation* menjawab sebagai berikut:

Informan 1: “...pemerintah desa biasanya mengumpulkan kami, seluruh anggota WKB ee lalu membicarakan apa yang terjadi di kelompok WKB, jika masalah yang terjadi tidak berat cukup diselesaikan di lingkungan WKB saja” (Wawancara, tanggal 26 Mei 2015).

Informan 2: “...kalau untuk itu, misalnya jika ada permasalahan yang terjadi di dalam WKB. Biasanya diadakan dengan musyawarah bersama dalam lingkungan wkb sendiri, jika permasalahannya tidak rumit” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari Pendamping KUBE WKB dan Kaur Keuangan Desa Pengudang menjawab sebagai berikut:

Informan 3: “...kalau permasalahan yang berat akan dibawa ke ranah desa dengan tokoh-tokoh masyarakat” (Wawancara, tanggal 1 Juni 2015).

Informan 4: “...kita lihat dulu masalahnya seperti apa? Artinya gak mungkin kalau masalah mungkin sifatnya hanya salah paham di internal mereka sampai kita memutuskan. Apa gak paling kita kan sebagai dibidang fasilitatorlah lebih enaknya kita cari tahu dulu akar masalahnya seperti apa, ya udah kita coba selesaikan”

(Wawancara, tanggal 28 Mei 2015).

Kemudian informan yang berasal dari Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut:

Informan 5: "...pemerintah desa melakukan rapat terhadap anggota KUBE WKB itu sendiri dan serta tokoh-tokoh masyarakat mencari solusi bersama ee untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di KUBE WKB itu sendiri" (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Informan 6: "...ee kembali kita kepada yang tadi kekeluargaan. kita akan panggil seluruh anggota kube, terus kita ee menanyakan sih apa permasalahan yang terjaddi. Terus kita memberikan masukan, memberi jalan keluar sehingga segala persoalan akan terselesaikan dengan baik. Itu tadi kita kembali kepada poin kekeluargaan yang sangat kita pentingkan memang" (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, *Key Informan* Menyatakan: "...tadi didepan sudah dibilangkan. Kita ini sistem kekeluargaan dalam kelompok, kan begitu. Nah jadi kami memang selalu. Kalau memang ada ee masukkan atau laporan kedesa bahwasanya ini ada suatu masalah atau antara KUBE? Anggota ee misalnya dalam pemasaran. Itu biasanya kami selalu ee menyelesaikan dengan musyawarah tingkat desa, yang mungkin awalnya ditingkat kelompok KUBE itu sendiri kalau memang itu tak terselesaikan, baru ini dinaikkan ke musyawarah tingkat desa. Jadi musyawarah tingkat desa ini kan disitu ada tokoh-tokoh masyarakat atau petua-petua atau orang-orang tua kita yang bisa memberikan solusi atau pandangan untuk menyelesaikan masalah tersebut

gitu" (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan* diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pemerintah desa mengadakan musyawarah kepada KUBE WKB yaitu, pemerintah desa mengadakan musyawarah dengan sisitem kekeluargaan. Dengan memanggil seluruh anggota KUBE WKB dan menanyakan akar masalah yang timbul di KUBE WKB dan mencari solusinya bersama. jika masalah yang terjadi hanya salah paham antara kube WKB cukup diselesaikan di internal WKB saja. Jika emang tidak terselesaikan juga maka pemerintah desa mengadakan musyawarah ketingkat desa dengan mengundang para tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari solusi bersama dalam penyelesaian masalah yang terjadi di KUBE WKB.

d. Adanya pergeseran nilai budaya

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa terhadap adanya pergeseran nilai budaya yaitu sebagai berikut :

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua KUBE WKB dan Ketua Yayasan *Island Fundation* menjawab sebagai berikut:

Informan 1: "...ooo kalau kecemburuan terhadap KUBE lainnya itu belum ada denngar pula! Tapi de, kalau dalam lingkungan WKB ada. Seperti: ee timbulnya persaingan antar anggota wkb sendiri" (Wawancara, tanggal 26 Mei 2015).

Informan 2: "...biasanya ada. Sifatnya seperti: persaingan kelompok antara satu kube dengan KUBE yang lainnya. Jadi, kecemburuan sosial itu biasalah terjadi. Bahkan didalam lingkungan WKB, timbulnya

persaingan antara anggota WKB dalam membuat produk” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari Pendamping KUBE WKB dan Kaur Keuangan Desa Pengudang menjawab sebagai berikut:

Informan 3: “...kalau kecemburuan sosial dari pihak KUBE-KUBE lain abang belum ada kabar? Kalau kecemburuan dari pihak anggota mereka sendiri, dalam arti kecemburuan itu salah satunya ada permasalahan mengenai produk, permasalahan itu sendiri sebenarnya *simple*” di dalam interen mereka, jadi ada ibuk-ibuk bilang kalau tidak ada saya WKB ini tidak jadi begini. (Wawancara, tanggal 1 Juni 2015).

Informan 4: “...yang jelasnya gini, yang namanya itu manusiawi ya kalau menurut saya pada prinsipnya kalau kami rasa dan percaya itu pasti ada kecemburuan sosial. Karena itu manusiawi, siapa sih manusia yang gak ingin punya kehidupan yang lebih baik, sama juga gak ada dong kube yang pengen kubunya keterbelakang terus, pasti ada kecemburuan. Cuma tidak sampai merugikan yang lain. Merugikan dalam arti gini, wah ini-ini diprovokator sampai orang ini rusak atau pecah, itu gak ada” (Wawancara, tanggal 28 Mei 2015).

Kemudian informan yang berasal dari Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut:

Informan 5: “...biasalah berupa kecemburuan sosial, karena kenapa KUBE WKB bisa bekerja dengan pihak yayasan, sedangkan ee kelompok-kelompok lain tidak ada. Cuma itu saja gak sampai menghasut kelompok-kelompok sekitar supaya WKB bubar”

(Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Informan 6: “..tidak ada yang berpandangan negatif, semua cukup baik ya. Karena pemerintah mengelolanya ee memang baik. Jadi tidak ada pandangan-pandangan miring atau merasa wah bahwa itu tidak betul. Malah kita sangat mendukung itu. Mereka kreatif membuat suatu hal dengan contohnya dari koran-koran bekas, mereka menciptakan berbagai macamlah kreatifitas kerajinan tangan” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, Key Informan Menyatakan:

“...sebenarnya bukan yayasan ini ee menganak tirikan KUBE yang lain ataupun kami menganak tirikan KUBE-KUBE yang lain. Tapi kan ada suatu jalur-jalur, mungkin ada kube ini, oh ini kemarin dipromosikan oleh pihak yayasan, jadi pengembangannya kalau bisa satu jalur. Kalau pihak-pihak lain ke dinas atau apa sudah kok disitu. Karena untuk pihak dinas dan yayasan bukan kube ini yang diperhatikan. Semua KUBE itu, tapi mungkin ada KUBE-KUBE kalau KUBE yang sekarang ee diperhatikan ini yang WKB ini satu jenis. Dalam artian ini kerajinan tangan yang dibuat dari limbah koran-koran yang tak terpakai. Jadi agak mudah pemantauannya, juga agak mudah untuk menyalurkan pemasarannya disitu. Karena satu ini kalau KUBE-KUBE yang lain itu kebanyakannya ada beberapa KUBE yang ee tidak satu jenis. Misalnya ada 10 orang anggota dengan kegiatan misalnya 4 macam, 3 macam seperti itu, sebenarnya bukan apa ya? Memang sih kalau dibidang kecemburuan sosial itu ada. Kok itu saja yang diperhatikan, ada. Tapi kan di situ paling tidak bisa menetralsisir kelompok KUBE-

KUBE itu” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan informan dan *key* informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa terhadap adanya perubahan nilai budaya di KUBE WKB yaitu adanya rasa kecemburuan sosial terhadap kubekube di sekitar pengudang dan dalam anggota KUBE WKB pun timbulnya persaingan kelompok dalam pembuatan produk.

3. Pemberdaya (*Empowering*)

Pemberdaya (*Empowering*), merupakan peran yang harus dijalankan oleh pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dalam studi KUBE Wanita Karya Bersama Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan dapat dilihat dari masing-masing pengukuran yaitu:

a. Memotivasi anggota kelompok untuk berkarya

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap peran pemerintah desa dalam memotivasi anggota kelompok wkb untuk berkarya yaitu sebagai berikut:

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua KUBE WKB dan Ketua Yayasan *Island Foundation* menjawab sebagai berikut:

Informan 1: “...kalau ini pemerintah desa memberikan semangat kepada kami dan membantu promosikan hasil kerajinan yang kami kepada pihak yayasan” (Wawancara, tanggal 26 Mei 2015).

Informan 2: “...memberikan semangat kepada anggota WKB dalam pengembangan produk kerajinan tangan yang baru dan berkualitas” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari Pendamping KUBE WKB dan

Kaur Keuangan Desa Pengudang menjawab sebagai berikut:

Informan 3: “...motivasi pada saat itu, supportnya pemdes luar biasa. Pemdes meminta kube itu agar bertahan ee walaupun dengan berkurangnya anggota tetap bertahan, bagaimana pun WKB telah membawa nama desa” (Wawancara, tanggal 1 Juni 2015).

Informan 4: “...selalu memberikan mereka masukkan bayangan kedepan, misalnya andaikan kalian ini adalah sebuah perusahaan kecil, nah yang namanya perusahaan ini pasti bersaing, tentunya ada pasang surut, jika terjadi sampai seperti itu, kita jangan menyerah, karena hal itu wajar, cuma kita harus cari tahu dimana kekurangan. Memang itu yang selalu kita sampaikan terhadap anggota KUBE WKB” (Wawancara, tanggal 28 Mei 2015).

Kemudian informan yang berasal dari Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut:

Informan 5: “..dengan cara pemerintah hmhm mencari donatur untuk produk-produk yang telah dibuat anggota KUBE WKB itu sendiri” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Informan 6: “...memberikan bimbingan kepada setiap KUBE, karena pemerintah desa selalu mendukung apapun yang baik, karena tujuannya agar KUBE berjalan dengan baik” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, *Key* Informan Menyatakan: “...Biasanya yayasan ini memperkenalkan produknya lewat online ataupun karena yayasan ini itu pemegang utamanya orang luar, orang yang sebenarnya bukan orang singapore, tapi

mereka memang ada satu wadah di Singapore itu *Island Foundation* ini, jadi lewat promosi-promosi itu lah, mereka menyalurkan produknya satu ya, kemudian kami kan ada donatur-donatur yang ee bisa juga disitu ee memberikan atau mencari solusi ya menyarankan produksi ini seperti apa? Jalurnya gimana? Kemana pemasarannya? Karena disini kalau untuk WKB ini, ini juga mendapat perhatian dari Dinsos dan BPMPKB Kabupaten Bintan. Nah jadi kadang-kadang mereka juga yang memberikan solusi disitu” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan informan dan *key* informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa dalam memotivasi anggota KUBE WKB untuk berkarya yaitu pemerintah desa meminta agar kube wkb tetap bertahan walaupun berkurangnya anggota dan membimbing KUBE WKB dalam pemasaran produk-produknya kepada pihak yayasan atau donatur-donatur.

b. Memfasilitasi anggota kelompok untuk berkeaktifitas

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap peran pemerintah desa dalam memfasilitasi anggota kelompok wkb untuk berkeaktifitas sebagai berikut:

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua KUBE WKB dan Ketua Yayasan *Island Foundation* menjawab sebagai berikut:

Informan 1: “...fasilitas sih dari desa berupa alat-alat dan bahan-bahan yang kami butuhkan untuk membuat kerajinan tangan” (Wawancara, tanggal 26 Mei 2015).

Informan 2: “...memberikan tempat atau berupa kios yang sudah ada, yang mana mereka gunakan untuk membuat kerajinan tangan. terus,

memberikan pandangan serta produk-produk yang mereka buat kepada pihak yayasan *Island Foundation*” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari Pendamping KUBE WKB dan Kaur Keuangan Desa Pengudang menjawab sebagai berikut:

Informan 3: “...fasilitas itu hmmm diawali dari bantuan ee uang, fasilitas uang dan mereka dari WKB , dari segi pemahaman kurang tau, akhirnya abang di ajak diskusi oleh pemdes untuk pembelian alat dan bahan yang mereka butuhkan” (Wawancara, tanggal 1 Juni 2015).

Informan 4: “... fasilitas sampai saat ini kita tidak ada memberikan fasilitas sifatnya bangunan, cuma pada prinsipnya apapun yang mereka lakukan, selagi itu positif dan didukung masyarakat dan kelompok itu sendiri, kita dukung karena mereka bangun itu dilokasi-lokasi anggota juga” (Wawancara, tanggal 28 Mei 2015).

Kemudian informan yang berasal dari Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut:

Informan 5 “..fasilitas itu pemerintah desa memberikan berupa tempat pemasaran dari ee hasil karya kerajinan tangan anggota KUBE WKB kepada ee Yayasan *Island Foundation*” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Informan 6: “...ee paling tidak tempat untu mereka ee melakukan kreatifitas ee dari kube itu sendiri. Terus bisa juga dari yayasan memberikan pemasaran, memberikan masukkan yang terbaik untuk kube itu sendiri. Sehingga kube itu bisa menikmati hasil dari apa yang mereka buat lah, jadi kehadiran yayasan yang

ada sekarang itu ee *Island Foundation* itu sangat membantu, karena pihak desa meminta juga dari pihak yayasan mempromosikan kepihak-pihak turis bahwa ini lo kerajinan-kerajinan yang ada dipengudang, ini lah kreatifitas mereka.” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, *Key Informan* Menyatakan: “...Mereka coba berusaha sendiri awalnya ya, mungkin mereka menanyakan kepada penduduk ada koran bekas gak? Tetapi kalau mereka sudah mentok, karena bahan dasar itu tidak selalu ada. Baru mereka mengajukan solusi gimana jalan keluarnya mungkin kepihak desa atau mungkin kepihak yayasan atau kepihak pemerintah atau ke SKPD yang ada, kan gitu. Mungkin disitu ee misalnya mereka memerlukan, oh kami kekurangan koran dimana kami cari, nanti disitu cari solusinya kaan gitu, untuk pengembangan mereka, kami kalau disini selalu berusaha mengajukan proposal-proposal untuk menambah, mungkin agar aktivitas mereka lebih ya, mungkin ada barang-barang, dulu kan secara tradisional, mungkin ngecat pakai kuas, kalau nanti kami mengajukan proposal untuk compresor agar lebih rapi seperti itu” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa dalam memfasilitasi anggota KUBE WKB untuk berkreatifitas dalam rangka pemberdayaan KUBE WKB yaitu pemerintah desa memberikan alat-alat dan bahan bahan yang di butuhkan KUBE WKB dengan mengajukan proposal untuk menambah agar aktifitas KUBE WKB menjadi semakin berkembang dan membantu

memasarkan hasil produk yang telah dibuat anggota KUBE WKB kepada pihak Yayasan *Island Foundation*.

c. Memberikan pelatihan

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa dalam memberikan pelatihan yaitu sebagai berikut :

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua KUBE WKB dan Ketua Yayasan *Island Foundation* menjawab sebagai berikut:

Informan 1: “... pelatihan biasanya pemerintah berikan dari pihak yayasan dan ada juga dari Dinsos atau intansi-intansi terkait” (Wawancara, tanggal 26 Mei 2015).

Informan 2: “...pelatihan sendiri yang jelas dari pihak yayasan dalam hal ini yayasan *Island Foundation*. Karena, pihak desa meminta kepada pihak yayasan menyediakan tenaga teknisi keterampilan untuk mengajarkan wkb kerajinan tangan yang baru dan ada juga dari Dinsos yang memberikan pelatihan kepada anggota WKB” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari Pendamping KUBE WKB dan Kaur Keuangan Desa Pengudang menjawab sebagai berikut:

Informan 3: “...pelatihan melalui pihak yayasan, sebelumnya WKB itu sudah mempunyai dasar dalam pembuatan kerajinan tangan, pada saat itu cuma dari kualitas dan segi pemasaran yang masih kurang” (Wawancara, tanggal 1 Juni 2015).

Informan 4: “...pelatihan itu yang rutin itu pasti dari yayasan. Karena udah ada tenaga teknisnya, kalau untuk yang lain-lain paling dari Dinsos”

(Wawancara, tanggal 28 Mei 2015).

Kemudian informan yang berasal dari Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut:

Informan 5: “..pelatihannya biasa yang diberikan desa terhadap anggota kube wkb itu kadang melalui pendamping keterampilan dari pihak yayasan atau instansi-intansi terkait yang mengerti dalam bidang kreatif, terutama dalam bidang kreatif kerajinan tangan” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Informan 6: “...mencari orang yang sudah mahir dalam kerajinan tangan yang punya kreatifitas yang bagus yang ditempat lain juga dia sudah menciptakan hal-hal yang wkb buat, yang bisa menghasilkan uang” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, *Key Informan* Menyatakan:

“...kami mencari jalan lewat SKPD yang ada mungkin BPMPKB atau Dinsos atau Dinas Pariwisata mungkin lewat situ, nah dari situlah mereka memberikan suatu pelatihan-pelatihan atau BIMTEK-BIMTEK tentang WKB atau kerajinan. Kalau dari yayasan itu sudah pasti karena yayasan ini adalah ee suatu yayasan yang membimbing mereka, memberikan secara teknisnya cara pemasarannya, kemudian juga memberikan pelajaran suatu ee apa ya? Kreatifitas atau kerajinan tangan supaya ini bagus lo gimana lo?” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah telah memberikan

pelatihan kepada anggota KUBE WKB yaitu melalui pihak yayasan. Karena pihak yayasan sudah mempunyai tenaga teknis dalam pengembangan kerajinan tangan dan pihak pemerintah juga melakukan pelatihan melalui instansi-intansi yang terkait yang mengerti di bidang kreatifitas kerajinan tangan.

d. Mendahulukan kepentingan umum

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa dalam mendahulukan kepentingan umum yaitu sebagai berikut :

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua KUBE WKB dan Ketua Yayasan *Island Foundation* menjawab sebagai berikut:

Informan 1: “... jelaslah dek mementingkan kelompok. Karena ini kan menyangkut permasalahan yang ada di desanya. Tentu pemerintah desa mementingkan yang umum agar masalah yang terjadi cepat terselesaikan” (Wawancara, tanggal 26 Mei 2015).

Informan 2: “...yang jelas untuk hal itu pemerintah desa lebih mementingkan kepentingan umum atau kelompok. Karena jika terjadi masalah di desa seperti dalam anggota wkb maka, pemerintah desa lebih mementingkan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakatnya” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari Pendamping KUBE WKB dan Kaur Keuangan Desa Pengudang menjawab sebagai berikut:

Informan 3: “...kalau ada masalah pemdes mengutamakan kepentingan bersama agar kondusif hubungan antara satu

sama yang lainnya” (Wawancara, tanggal 1 Juni 2015).

Informan 4: “...otomatis pasti mementingkan KUBEnya, karena mereka awalnya dari KUBE. Karena agar menjaga KUBE tetap harmonis” (Wawancara, tanggal 28 Mei 2015).

Kemudian informan yang berasal dari Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut:

Informan 5: “...ya itu jelas pemerintah desa mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Itu karena agar KUBE WKB menjadi kube yang terbaik dan bisa menjadi contoh bagi KUBE-KUBE yang lainnya” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2015).

Informan 6: “...tetap kita mementingkan kepentingan kelompok dulu, kepentingan orang banyak dulu. Pribadi itu soalan pribadi jadi, yang namanya kelompok itu kan berarti sudah lebih dari satu orang, dua orang dan seterusnya, itu namanya kelompok. Jadi memang beberapa anggota itu menyatukan tidak gampang. Bagaimana kita menciptakan menjadi satu. Tujuannya menjadi ibu-ibu yang kreatif” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, Key Informan Menyatakan: “...sebenarnya dalam kenyataannya, namanya manusia selalu berpikir pribadi ya? Tapi karena ini suatu kelompok ya kami memang harus melihat kondisi dilapangan dulu, ini sebenarnya keadaannya seperti apa kan gitu! Kita tidak bisa memaksa kehendak, oh kamu harus memikirkan umum, itu kan gak bisa. Karena seseorang itu kebutuhannya berbeda-beda, nah jadi kami menyarankan emang ee dalam suatu kelompok itu mengutamakan kepentingan umum. Karena kepentingan

umum itu adalah kepentingan bersama untuk pengembangan kelompok itu sendiri, untuk kemajuan kelompok itu sendiri dan yang mendapat hasil bukan pribadi-pribadi tapi kelompok itu sendiri” (Wawancara, tanggal 29 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan informan dan *key* informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa lebih mendahulukan kepentingan umum karena dengan mendahulukan kepentingan umum dapat membuat kondisi internal KUBE WKB menjadi kondusif dalam pengembangan WKB, Agar KUBE WKB menjadi contoh bagi KUBE-KUBE yang ada di Desa Pengudang.

#### **Faktor-faktor Yang Menjadi Pendorong Dan Penghambat Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (*Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita Karya Bersama di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan*, penulis mendapati hasil mengenai faktor pendorong Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

1. Pemerintah Desa mengadakan pelatihan kerajinan tangan terhadap anggota KUBE WKB melalui pihak Yayasan Island Foundation yang telah mempunyai tenaga teknis keterampilan dalam pengembangan karya kerajinan tangan.
2. Pemerintah Desa lebih menfokuskan kepentingan umum terhadap anggota KUBE WKB, agar kondisi di dalam anggota KUBE WKB menjadi kondusif.

Adapun faktor penghambat dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (*Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita Karya Bersama di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan*, yaitu:



1. Terjadinya kecemburuan sosial terhadap KUBE-KUBE sekitar Desa Pengudang.

Timbulnya persaingan antara kelompok WKB dalam membuat kerajinan tangan untuk mendapatkan hasil perseorangan.

#### V. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan data dari informan dan *key-informan* pada bab IV yang dilakukan di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita Karya Bersama Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan), kemudian penulis menyimpulkan dari keseluruhan jawaban informan terhadap variabel peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan, terlihat dalam indikator sebagai berikut:

##### 1. Perencanaan Alur (*Pathfinding*)

- a. Membuat visi dalam pemberdayaan masyarakat KUBE WKB di Desa Pengudang sudah terlaksana dengan cara Pemerintah Desa menyelaraskan Visi WKB dengan Visi Desa, karena Visi Desa banyak keterkaitannya dengan pengembangan pariwisata di Desa Pengudang.
- b. Membuat misi dalam pemberdayaan masyarakat KUBE WKB di Desa Pengudang sudah terlaksana dengan cara Pemerintah Desa menyelaraskan Misi WKB dengan Misi Desa dalam memberikan arahan atau pengetahuan kepada anggota KUBE WKB dalam pengembangan kerajinan tangan.
- c. Memberikan saran dalam pemberdayaan masyarakat KUBE WKB di Desa Pengudang sudah terlaksana seperti, Kepala Desa memberikan semangat dan masukkan kepada anggota KUBE WKB dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dipasaran.

- d. Bersikap kekeluargaan dalam pemberdayaan masyarakat KUBE WKB di Desa Pengudang sudah terlaksana melalui sistem pendekatan kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan ini lebih efektif seperti memberikan motivasi, saling berinteraksi kepada anggota KUBE WKB dalam pengembangan kerajinan tangan.

##### 2. Penyelaras (*Aligning*)

- a. Mengelola aturan yang ada dalam pemberdayaan masyarakat KUBE WKB di Desa Pengudang sudah terlaksana dengan memberikan masukan aturan-aturan yang baik yang telah disepakati bersama oleh pihak desa dan pihak WKB dalam pengembangan pelaksanaan KUBE WKB.
- b. Mengawasi aturan yang ada dalam pemberdayaan masyarakat KUBE WKB di Desa Pengudang sudah terlaksana melalui pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dalam memantau pengembangan KUBE WKB dengan menyampaikan laporan-laporan setiap persemester seperti 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali kepada pihak desa.
- c. Mengadakan musyawarah dalam pemberdayaan masyarakat KUBE WKB di Desa Pengudang sudah terlaksana dengan memanggil seluruh anggota KUBE WKB dan menanyakan akar permasalahan yang timbul di KUBE WKB dengan mencari solusinya bersama, apabila masalah tidak terselesaikan dilingkungan internal KUBE WKB, maka pemerintah desa mengadakan musyawarah ketingkat desa dengan mengundang para tokoh-tokoh masyarakat dalam mencari penyelesaian masalah yang terjadi di KUBE WKB.
- d. Adanya pergeseran nilai budaya dalam pemberdayaan masyarakat KUBE WKB di Desa Pengudang. Timbulnya rasa kecemburuan sosial diantara KUBE-KUBE yang ada di Desa Pengudang dan timbulnya persaingan antara anggota KUBE

- WKB dalam mendapatkan penghasilan secara individual.
3. Pemberdaya (*Empowering*)
    - a. Motivasi anggota untuk berkarya dalam pemberdayaan masyarakat KUBE WKB di Desa Pengudang sudah terlaksana dengan meminta agar KUBE WKB tetap bertahan walaupun berkurangnya anggota dan membimbing KUBE WKB dalam pemasaran produk-produk WKB ke pihak Yayasan *Island Foundation*.
    - b. Memfasilitasi anggota untuk berkeaktifitas dalam pemberdayaan masyarakat KUBE WKB di Desa Pengudang sudah terlaksana dengan menyediakan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan anggota WKB dalam membuat kerajinan tangan dengan mengajukan proposal dan memasarkan produk-produk KUBE WKB ke pihak Yayasan *Island Foundation* atau donatur-donatur.
    - c. Memberikan pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat KUBE WKB di Desa Pengudang sudah terlaksana melalui pihak yayasan *Island Foundation* yang mempunyai tenaga teknis dalam pengembangan kerajinan tangan dan instansi-instansi yang terkait yang mengerti dibidang kerajinan tangan.
    - d. Mendahulukan kepentingan umum dalam pemberdayaan masyarakat KUBE WKB di Desa Pengudang sudah terlaksana karena dengan mendahulukan kepentingan umum dapat membuat kondisi internal di KUBE WKB menjadi kondusif dalam pengembangan kelompok dalam pembuatan produk kerajinan tangan, supaya produk WKB memiliki kualitas yang berdaya saing, dan sebagai contoh bagi KUBE-KUBE yang ada di Desa Pengudang.

**Saran**

Saran yang perlu diberikan kepada Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita Karya Bersama Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebung Kabupaten Bintan).

- a. Pemerintah desa harus memberikan pemahaman terhadap KUBE-KUBE yang ada di sekitar Desa Pengudang agar tidak timbul nya kecemburuan sosial terhadap KUBE WKB. Karena KUBE di Desa Pengudang yang bekerja sama dengan pihak yayasan hanya KUBE WKB saja.
- b. Pemerintah Desa harus menjaga komunikasi internal di dalam KUBE WKB. Agar tidak timbulnya persaingan antara anggota WKB dalam pengembangan kerajinan tangan yang akan berdampak negatif terhadap KUBE WKB ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta
- Aziz, Moh Ali dkk, 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi dan Metodologi*. PT. LKIS Pelangi Askara. Jakarta
- Hafsah, M. Jafar, 2008, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Iris Press. Bandung
- Hikmat, R. Harry, 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Pers. Bandung
- Juliantara, Dadang, 2005. *Peningkatan Kapasitas pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Pembaharuan, Yogyakarta.
- Kadarisman, M, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan Kedua)*, Rajawali Pers. Jakarta
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kreitner, Kinicki, 2005. *Perilaku Organisas.*, Salemba Empat, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Namawi, H. Hadari, 2003. *Kepemimpinan Mengektifkan Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana. Jakarta
- Nasution, Zulkarnain, 2009. *Solidaritas Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. UMM Pers. Malang
- Nogroho, Iwan dan Dahuri Rokhim, 2012. *Pembangunan wilayah: perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan* – Ed. Rev., cet.2. – Jakarta. LP3ES,
- Rivai, Veithzal, 2013, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Edisi Kedua)*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Soetomo, 2009. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka: Merangkai Sebuah Kerangka*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama. Jakarta
- Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung . 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung
- Sunyoto, Danang dan Burhanudin. 2011. *Perilaku Organisasi (Cetakan Pertama)*. PT Buku Seru. Jakarta
- Thoha, Miftah, 2003, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wasistiono, Sadu, 2007. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Goverance*. LIPI Press. Jakarta
- Widjaja, HAW., Prof. Drs., 2003, *Pemerintahn Desa / Marga*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wulansari, Dewi, 2009, *Sosiologi Konsep Dan Teori*. PT Refika Aditama. Bandung

Zubaedi, 2013, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik (Edisi Pertama)*. PT Fajar Interpratama Mandiri. Kencana

**Dokumen:**

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Data Monografi Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebung Kabupaten Bintan Tahun. 2013

Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian Dan Skripsi Serta Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2011